BAB I

PERKEMBANGAN PERMUKIMAN KUMUH DI JAKARTA TAHUN 1960 - 1969

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membuka peluang orang Indonesia untuk mengolah sendiri potensi kotanya. Proklamasi memungkinkan elit-elit pribumi untuk duduk di jajaran pemerintahan kota, salah satunya Jakarta. Secara umum, kota ini menjadi pusat pemerintahan negara. Dengan keadaan demikian, posisi Jakarta jelas vital bagi republik yang baru berdiri. Kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor pusat perusahaan, tempat-tempat hiburan, lembaga pendidikan, rumah sakit, jalan kendaraan bermotor telah dibangun oleh pemerintah kolonial jauh sebelum proklamasi. Sebagian besar elit negara berkantor di kota ini. Orang-orang dari beragam suku bangsa seperti Eropa, Cina, Jepang, dan Melayu berbagi tempat di kota ini (Hanggaro, 2011 :14).

Penduduk desa pindah ke kota ini hanya untuk mencari penghidupan yang lebih baik daripada di desanya. Dengan demikian, tenaga kerja manusia jelas berlimpah. Meski kondisi kota belum normal karena revolusi masih berlangsung, keadaan di kota masih lebih baik ketimbang di desa (Paulus, 1986:14). Masih lebih banyak pula pekerjaan yang didapat di kota meski tergolong tenaga kerja murah. Kota pun memerlukan tenaga kerja murah tersebut dalam usaha pembangunan kota. Orang-orang dari desa adalah pilihan yang tepat. Dalam masa revolusi, banyak desa di sekitaran Jakarta (ommelanden) yang tidak aman lagi bagi penduduknya. Jakarta pun sebenarnya bukanlah tempat yang aman untuk lari dari konflik yang pecah karena revolusi. Tetapi, pusat kota terlihat jauh lebih aman bagi penduduk desa karena adanya petugas keamanan yang menjaga pusat pemerintahan. Pasca kemerdekaan belum sempat jakarta berbenah gangguan masih tetap ada dari pihak yang masih mengiginkan indonesia maupun ancaman dari dalam sendiri. Jakarta sebagai ibu kota indonesia sangat tergantung pada situasi poltik pada saat itu di pemerintah indonesia

masih memikirkan menangani ancaman dari dalam maupun dari luar dari pada membangun kota-kota di Indonesia. Jakarta memasuki dasawarsa baru dengan status baru. Selain sebagai ibukota negara, ia juga mempunyai kewenangan otonom mengatur pemerintahan kota. Kota ini memiliki keistimewaan dengan sebutan kotapraja. Pemberian sebutan ini sesuai dengan Undang-Undang Darurat RIS No. 44 Tahun 1950.

Bersamaan dengan penambahan status kotapraja, kehidupan masyarakat Jakarta berangsur pulih menuju kenormalan. Setelah berbagai pertempuran kota yang terjadi di dalamnya, kota ini tetap dihuni oleh beragam orang dari daerah dan suku bangsa yang berbeda. Setidaknya ada 47 suku bangsa yang tinggal di Jakarta. Orang-orang asing itu ditempatkan oleh kantor perwakilan negaranya masing-masing. Kota seluas 560 km² yang terbagi atas 6 kawedanan dengan 21 kecamatan dan 139 kelurahan. Di awal tahun 1950, jumlah penduduk Jakarta sendiri sudah mencapai 1.432.085 orang (Djalal, 1977 : 13). Wilayah Jakarta mempunyai iklim tropis dengan suhu rata-rata sepanjang tahun 27° C dari bulan Nopember sampai dengan bulan April bertiup angin Muson Barat, dan dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober bertiup angin Muson Timur. Keadaan sehari-hari dipengaruhi oleh angin laut. Curah hujan sepanjang tahun adalah rata-rata 2.000 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di sekitar bulan Januari dan yang terendah sekitar bulan September. Wilayah DKI Jakarta letaknya landai dengan ketinggian kurang dari 7 meter dari permukaan laut, bahkan di daerah bagian pantai rata-rata merupakan daerah rawa-rawa atau daerah yang selalu tergenang air pada musim hujan. Di tengah kota mengalir sungai Ciliwung yang membagi wilayah DKI Jakarta menjadi bagian Timur dan Barat. Letak yang landai ini kurang menguntungkan terhadap pembangunan drainase dan saluran air buangan sehingga sering terjadi banjir di musim hujan.

Sedangkan Ir. Soekarno ingin menjadikan Jakarta sebuah kota mercusuar dunia ketiga. Kota ini diharapkan mampu menjadi penerang bagi kota-kota di dunia ketiga. Soekarno sendiri telah menjadikan dirinya sebagai pemimpin bagi negara-negara di dunia ketiga. Semangat dan ide anti-imperialisme dan anti-neokolonialismenya telah banyak menarik simpati pemimpin-pemimpin negara di dunia

ketiga ketika Indonesia menggelar Konferensi Non-Blok. Soekarno menyebut negara-negara di Dunia ketiga sebagai *new emerging forces* (*nefo*). Negara - negara inilah yang ditakdirkan bertarung melawan kekuatan-kekuatan lama, *old established forces* (*oldefos*). Bangsa-bangsa progresif itu memerlukan pemandu dalam usahanya melawan neo-kolonialisme. Bagi Soekarno, dirinya, sebagai perwujudan Indonesia, dan Jakarta adalah sosok yang tepat menjadi pemandu Pembangunan-pembangunan fisik yang semarak di Jakarta itu tak sulit dibaca sebagai lambang nasionalisme. Soekarno selalu memberikan sentuhan perjuangan bangsa dalam tiap bangunan yang dirancangnya. Persatuan dan identitas nasional yang diimpikan Soekarno menemukan bentuknya dalam bangunan-bangunan rancangannya di Jakarta. Soekarno melakukan eksplorasi budaya nasional secara besar-besaran dalam rancangannya. Pembangunannya itu juga menyedot dana yang tak sedikit. Tumpukan hutang luar negeri jelas meningkat. Lapangan pekerjaan muncul dari pembangunan yang semarak itu. Buruh-buruh musiman berdatangan ke ibukota melihat remah-remah gula. Mereka ikut membantu proyek pembangunan mercusuar itu meski tanpa disediakan tempat tinggal tetap oleh kontraktor. Banyak nya pendatang untung mengadu nasib serta bekerja sebagai kuli bangunan tak ayal menciptakan pemukiman pemukiman baru yang menyebel ke seluruh antero Jakarta salah satunya ke Jakarta bagian selatan.

Pertumbuhan penduduk Jakarta yang cukup pesat membuat daerah-daerah permukiman baru terus bermunculan. Apalagi sebagian besar orang yang datang ke Jakarta adalah penduduk desa yang kurang mampu dan kurang berpendidikan. Mereka membangun rumah di tanah-tanah kosong di tengah kota atau di daerah perkampungan sekitarnya, sepanjang kali dan rel kereta api. Beberapa daerah pemukiman lainnya yang tumbuh cukup pesat pada 1960-an adalah Pasar minggu, Jagakarsa, Pancoran, Pasar Rebo, Kampung Melayu (Lubis, 2008:55)

Dari segi ragam etnis, komposisi penduduk Jakarta zaman Orla tahun 1960-an berbeda dengan tahun 1950-an. Pada 1960-an, sangat jarang kita temui ras kulit putih keturunan Eropa. Sebagian besar dari mereka (kebanyakan Belanda Indo) hengkang ke

negeri Belanda sejak tahun 1957-1958 karena memuncaknya sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Kita mengenal kejadian ini sebagai pengusiran warga Belanda, namun istilah yang mereka gunakan ialah *repatrieren* atau repatriasi. mereka malah menganggap Belanda sebagai negeri asing atau negeri yang baru. Etnis nonpribumi terbanyak yang tinggal di Jakarta pada 1960-an masih tetap penduduk keturunan Cina. Sudah sejak lama mereka merupakan penduduk minoritas terbesar di Jakarta maupun di Indonesia. Saya kira jumlah mereka di Jakarta tahun 1960-an tidak banyak berubah dengan tahun 1950-an. Menurut sensus tahun 1961, jumlah mereka pada waktu itu sebesar 294.000 orang atau 10,1 persen dari seluruh penduduk Jakarta. Jumlah yang cukup besar karena seluruh penduduk keturunan Cina di Indonesia tidak lebih dari tiga persen.

Jumlah penduduk Cina yang relatif besar di Jakarta sudah lama terjadi. Sejak Batavia didirikan oleh Jan Pieterszoon Coen pada permulaan abad ke-17. Penduduk Cina sudah banyak yang datang untuk bermukim di sini. Pada mulanya, yang datang hanya laki-laki Cina saja. Maka, banyak diantara mereka yang kawin dengan perempuan pribumi. Keturunannya disebut Cina peranakan atau *kiau-seng*. Mereka kemudian banyak melakukan perkawinan antar sesamaketurunan peranakan dan membentuk suatu komunitas Cina peranakan. Setelah akhir abad ke-19, barulah perempuan Cina berdatangan ke Nusantara sehingga ada juga penduduk Cina yang disebut totok atau *hoakiau*. Karena sejarah keberadaannya yang lama, pengaruh budaya Cina cukup terasa di Jakarta. Misalnya dalam tari ckek dan gambang kromong yang merupakan perpaduan antara kesenian Cina dan Betawi, juga dalam adat perkawinan Betawi serta kebiasaan bakar petasan (Iubis, 2008 : 57).

Pada 1960-an, komposisi penduduk etnis suku Indonesia yang tinggal di Jakarta semakin bertambah karena proses urbanisasi terus-menerus berlangsung. Sebagian besar pendatang baru ini berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Kedatangan berbagai etnik Nusantara telah membuat Kota Jakarta lebih mosaik, menjadi *melting pot* dari berbagai suku bangsa yang membangun bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sejak saat itu Jakarta disebut sebagai

Kota kebangsaan. Untuk menggambarkan penduduk Jakarta yang multietnis ini, saya kutip hasil sensus penduduk tahun 1961 di Jakarta, yaitu orang Betawi sebanyak 22,9%, Sunda 32,85%, Jawa-Madura 25,4%, Minangkabau 2,1%, Sumatera Selatan 1,2%, Batak 1,0%, Sulawesi Utara 0,7%, Melayu 0,7%, Sulawesi Selatan 0,6%, Maluku dan Irian 0,4%, Aceh 0,2%, Banjar 0,2%, Nusa Tenggara Timur 0,2%, Bali 0,1%, Cina 10,1%. Jumlah penduduk Jakarta pada permulaan tahun 1960-an ini sekitar tiga juta lebih.

Perpindahan tersebut tidak serta merta membuat stratifikasi dan klasifikasi kelas yang diciptakan oleh orang Belanda menghilang. Orang Belanda tetap dapat menempati posisi yang tinggi ketimbang masyarakat pribumi. Perpindahan ke luar tembok kota itu tidak serta merta meleburkan permukiman orang Belanda dan permukiman masyarakat pribumi. Sebab, permukiman yang dibangun di wilayah baru tersebut tetap merupakan simbolisasi superioritas orang Belanda atas masyarakat pribumi dengan ditandai adanya pembangunan fasilitas penunjang permukiman yang tidak ditemukan pada permukiman masyarakat pribumi. Apalagi masyarakat pribumi kemudian menempati daerah utara kota yang telah rusak dan kotor. Karena kota yang terus menuntut berkembang seiring dengan bertambahnya penduduk, pemerintah Batavia melakukan perumusan ulang kebijakan pembangunannya. Batavia mulai menjadi kota perdagangan internasional setelah dilakukan pembangunan pelabuhan baru pada akhir abad ke-19. Pelabuhan lama, yaitu Pelabuhan Pasar Ikan, dianggap sudah tidak memadai lagi untuk menampung kapal-kapal besar yang datang ke Batavia. Oleh karena itu, pemerintah kolonial membangun sebuah pelabuhan baru pada akhir abad ke-19. Pelabuhan ini dikenal dengan nama Tanjung Priok. Selanjutnya, pemerintah kolonial membangun tempat-tempat kediaman baru untuk penduduk asing dan orang Belanda. Tempat-tempat kediaman itu antara lain Menteng, Gondangdia, Menteng Pulo, Gunung Sahari, dan Kemayoran. Batavia sendiri direncanakan oleh pemerintah kolonial sebagai kota untuk jumlah penduduk 600.000 sampai 800.000 jiwa (Ali dan Bodmer, 1969: 36).

Di wilayah itu, rencananya akan dibuat kota satelit. Kota ini diproyeksikan sebagai wilayah permukiman. Wilayah ini kemudian disebut dengan nama kota Satelit Kebayoran. Akan tetapi, kota satelit ini tidak mampu berdiri sendiri sehingga kota satelit ini akhirnya masuk ke dalam wilayah Jakarta itu sendiri. Beberapa wilayah permukiman baru juga bermunculan, terutama permukaan kumuh dan liar dengan gubuk-gubuk yang mengalir. Pada tahun 1952 tercatat setidaknya ada sekitar 30.000 gubuk liar. Sementara itu, pertumbuhan penduduk di Jakarta yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan kantor-kantor dan perumahan pegawai. Hal ini terlihat ketika Jakarta memasuki tahun 1950-an. Pada masa walikota Sjaamsuridjal (1951–1953), daerah-daerah padat penduduk yang tidak mempunyai kualitas permukiman yang memadai, misalnya fasilitas pengumpulan sampah, terdapat di sekitar wilayah hotel Indonesia sekarang (Grijns dan Peter 2007:245).

Permukiman kumuh dan liar semakin menunjukkan tanda meluas dan menyebar memasuki 1960-an. Ir. Soekarno memulai rencana proyek pembangunan mercusuar seperti persiapan pembangunan infrastruktur Asian Games 1962 dan proyek-proyek penanggulangan banjir di Jakarta (sosroatmojo 1981:383) yang nantinya proyek-proyek tersebut membuat banyak warga kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, jumlah populasi penduduk Jakarta terus bertambah pada masa 1960-1970. Jumlah penduduk Jakarta pada masa itu tercatat sekitar 4.546.432 jiwa (Koestoer 2001:202). Hal ini membuat pemerintah kota mencari kebijakan yang tepat mengenai permukiman. Gubernur Soemarno (1960-1964) mencoba menyediakan permukiman yang layak dengan membangun perumahan missal di Kalibata diatas tanah seluas delapan hektar. Namun, ia kemudian digantikan oleh Henk Ngantung (1964-1965). Hal ini tentu saja membawa pengaruh terhadap programnya (Lohanda, 2007: 67).

Dengan demikian, kondisi sosial-budaya masyarakat Jakarta menjadi mutlak dijelaskan dalam karya ini. Karena karya ini adalah karya sejarah, karya ini mengambil sebuah studi kasus. Studi kasus ini dapat mencari multikasualitas dari peristiwa sejarah. Sebagai studi kasus dan sejarah, Karya ini tidak dimaksudkan

untuk mendirikan hukum umum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam sejarah pemukiman - pemukiman kumuh di Jakarta.

Batasan temporal tulisan ini adalah 1960—1969. Peneliti mengambil tahun 1960 sebagai batas temporal awal penulisan karena pada tahun ini citra Jakarta sebagai sebuah kota mercusuar bagi dunia ketiga mulai dilaksanakan dengan pengangkatan Gubernur Soemarno. Ia adalah orang yang memiliki kesamaan visi dengan Soekarno tentang Jakarta. Soekarno pun tampak cocok dengannya sehingga ia turut berperan dalam penunjukkan Soemarno sebagai Gubernur Jakarta. Pengangkatan Soemarno tersebut berarti juga merumuskan ulang Jakarta sebagai kota karena citraan Soemarno tentang Jakarta tentu berbeda dengan citraan walikota dan gubernur sebelumnya. Penulis mengambil tahun 1969 sebagai batas temporal akhir penulisan karena pada tahun ini Pemerintah Jakarta mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai penanggulangan permukiman kumuh. Kebijakan ini dikenal dengan nama Proyek Muhammad Husni Thamrin (Lohanda, 2007: 104).

Sedangkan untuk batasan spasialnya, tulisan ini memusatkan perhatian pada wilayah pusat kota Jakarta. Sebab, dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jakarta, wilayah pusat kota adalah wilayah yang dapat dikategorikan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan permukiman yang padat karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi. Menurut (Parsudi Suparlan, 2004) permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang kondisi fisik hunian dan tata ruangnya mengungkapkan kondisi kurang mampu atau miskin dari para penghuninya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan ruang yang tinggi, baik tingkat kepadatan volume maupun frekuensinya. Kondisi lingkungan permukiman kumuh umumnya kurang memadai dari segi fasilitas-fasilitas umum seperti air bersih, pembuangan air limbah, sampah, dan sebagainya. Peneliti meminjam konsep tersebut untuk diterapkan dalam tulisan ini. Selain itu, konsep permukiman kumuh yang dimaksud dalam tulisan ini adalah permukiman kumuh yang legal/pemukiman

penduduk resmi maupun ilegal/pemukiman liar. Artinya, permukiman kumuh yang mendapat izin dari pemerintah maupun permukiman kumuh yang tidak mendapat izin dari pemerintah. Permukiman liar yang tidak kumuh tidak termasuk dalam kajian tulisan ini. Permukiman-permukiman itu melengkapi wilayah-wilayah kumuh dan liar yang lebih dulu ada seperti Jatinegara, Kota, Gambir, Pasar Senen, dan Kampung Melayu. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat setelah Perang Dunia II menunjukkan bahwa telah terjadi urbanisasi besar-besaran sehingga menyebabkan penduduk Jakarta menjadi 3 juta jiwa pada 1961 dan 60 persen penduduknya tinggal di kampung dengan kondisi prihatin (berdinding bambu atau kardus) (Sedyawati, 1987: 12). Hal itu menambah tugas berat bagi pemerintah Jakarta setelah Kemerdekaan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian atas permukiman kumuh (*slum area*) di Jakarta 1960-1969. Permasalahan dan fokus kajian tersebut akan dikaji dengan judul *Perkembangan Pemukiman Kumuh di Jakarta tahun 1960 – 1969*.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari analisis masalah yang telah dipaparkan perihal yang telah terbentuk dan tersebarnya permukiman kumuh selama rentang waktu 1960-1969, ada permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang kemunculan permukiman di Jakarta tahun 1960 - 1969?
2. Bagaimana dinamika kehidupan masyarakat permukiman kumuh di dalam kota tahun 1960 – 1969?
3. Bagaimana upaya pemerintah DKI Jakarta menanggulangi permukiman kumuh di Jakarta pada tahun 1960 – 1969?
4. Bagaimana perkembangan serta perubahan peta permukiman kumuh di Jakarta tahun 1960-1969?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah menjelaskan pembangunan kota dan masyarakat Jakarta yang berkaitan dengan proses terbentuknya dan tersebarnya permukiman-permukiman kumuh di Jakarta 1960-1969, Selain itu, konsep permukiman kumuh yang dimaksud dalam tulisan ini adalah permukiman kumuh yang legal maupun ilegal. Artinya, permukiman kumuh yang mendapat izin dari pemerintah maupun permukiman kumuh yang tidak mendapat izin dari pemerintah. Permukiman liar yang tidak kumuh tidak termasuk dalam kajian tulisan ini. sebab topik ini belum banyak diteliti dengan metode sejarah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Bagaimana kemunculan permukiman di Jakarta tahun 1960 - 1969.
2. Menjelaskan dinamika masyarakat permukiman kumuh di dalam kota tahun 1960 - 1969.
3. Memaparkan bagaimana pemerintah DKI Jakarta menanggulangi permukiman kumuh di Jakarta pada tahun 1960 – 1969.
4. Bagaimana perkembangan peta permukiman kumuh di Jakarta tahun 1960-1969?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Menambah informasi tentang sejarah lokal di daerah Jakarta khususnya mengenai perkembangan pemukiman masyarakat Jakarta dan kondisi masyarakatnya pada pertengahan abad ke-20.

2. Menjadi salah satu sumber pembelajaran sejarah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas terutama dalam pengetahuan tentang sejarah perkembangan permukiman masyarakat di Jakarta.

E. Tinjauan pustaka

Pandangan para sumber Jakarta terhadap kotanya menjadi sumber yang berharga dalam tulisan ini. Dalam tinjauan pustaka penulis menggunakan literature yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat khususnya masyarakat Jakarta. Yang pertama penulis menggunakan buku *Djakarta Djaja Sepandjang masa didalamnya* menjelaskan mengenai Jakarta dalam dekade 1960-an. Kemudian penulis juga menggunakan buku karya Koentjoroningrat yang berjudul *Masyarakat Desa di Indonesia yang terbit tahun 1964*. Selanjutnya, buku-buku sekunder seperti karya Lea Jellinek, *seperti roda berputar : Perubahan Sosial Sebuah kampong di Jakarta* yang membahas masyarakat permukiman kumuh di Kebon Kacang sejak kemunculannya setelah kemerdekaan hingga decade 1980-an; karya Koentjoroningrat, *masalah-masalah pembangunan : Bunga Rampai Antropologi Terapan* yang menyajikan tulisan hubungan desa-kota; dan karya Farabi Faikh, *membayangkan ibukota di bawah soekarno* yang menggambarkan pembangunan Jakarta di bawah soekarno, disertakan untuk menambah kekurangan sumber primer berupa wawancara. Serta beberapa artikel terkait yang berhubungan dengan Sejarah Permukiman Kumuh di Jakarta .

F. Metode dan Teknik Penelitian

Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007: 13). Metode yang digunakan dalam mengkaji skripsi ini adalah metode historis/sejarah. Sjamsuddin (2007: 14) mengartikan metode penelitian sejarah sebagai suatu cara bagaimana mengetahui sejarah. Sjamsuddin (2007: 89)

mengungkapkan enam langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah yaitu :

1. Memilih judul atau topik yang sesuai.
2. Mengusut semua eviden (bukti) yang relevan dengan topik.
3. Membuat catatan yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung.
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah berhasil dikumpulkan (kritik sumber).
5. Menyusun hasil penelitian ke dalam pola yang benar atau sistematika tertentu.
6. Menyajikan dan mengkomunikasikannya kepada pembaca dalam suatu cara yang menarik perhatian, sehingga dapat dimengerti.

Dari keenam langkah tersebut, tahapan memilih topik, menyusun semua bukti-bukti sejarah dan membuat catatan termasuk pada tahap heuristik, sedangkan mengevaluasi semua bukti-bukti sejarah termasuk tahap kritik dan terakhir menyusun hasil penelitian serta mengkajinya termasuk tahap historiografi (Sjamsuddin, 2007: 155). Ketiga tahapan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber-sumber Sejarah)

Ini merupakan tahap awal dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan masalah atau judul yang akan dikaji. Peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Kritik Ekternal dan Internal Sumber

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan seleksi dan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Kritik yang dilakukan ini meliputi dua aspek yaitu aspek eksternal yang digunakan untuk menilai otentitas dan integritas dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Sementara aspek internal digunakan untuk melihat dan menguji dari dalam mengenai reliabilitas dan kredibilitas isi dan sumber-

sumber sejarah yang telah diperoleh. Dari proses kritik ini sumber-sumber sejarah selanjutnya di sebut fakta-fakta sejarah.

3. Interpretasi (menafsirkan sumber sejarah) dan Historiografi

Pada tahap ini, peneliti memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari hasil kritik eksternal maupun internal. Fakta-fakta dihubungkan, disusun dan dianalisis sehingga diperoleh penjelasan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Selanjutnya peneliti menyajikannya dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi. Sedangkan historiografi itu sendiri merupakan proses penyusunan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan.

G. Teknik Penelitian

Dalam rangka penulisan Skripsi, penulis menggunakan teknik studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dan majalah yang relavan dengan permasalahan yang peneliti kaji. Sumber-sumber yang telah terkumpul, selanjutnya peneliti kaji dan pelajari sesuai dengan langkah-langkah dalam penelitian sejarah seperti yang telah diuraikan di atas. Teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistem *Harvard* yaitu sistem membahas format untuk penulisan dan pengorganisasian kutipan dari materi sumber. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan *author-date system* (sistem penulis-tanggal) dan *parenthetical referencing* (penulisan referensi dalam kurung). teknik penulisan ini sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UPI (2012)

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, dan Kesimpulan. Pembagian tiada lain untuk mempermudah dalam memahami penulisan.

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya termuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti muncul dan penting serta memuat alasan pemilihan masalah tersebut sebagai judul. Bab ini juga berisi perumusan dan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, penjelasan judul, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritik dan Tinjauan Pustaka. Bab ini merupakan tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis dari berbagai referensi yang berhubungan sejarah perkembangan permukiman kota Jakarta dan apa yang di sebut dengan keterkaitan untuk sumber – sumber yang dapat dijadikan referensi bagi penulisan ini.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini membahas langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis dan cara penulisannya. Dengan begitu prosedur dalam penelitian akan di bahas pada bab ini.

Bab IV Pembahasan. Bab ini merupakan isi utama dari tulisan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini akan dijelaskan, Bagaimana latar belakang kemunculan permukiman kumuh di Jakarta tahun 1960 - 1969? Bagaimana dinamika kehidupan masyarakat permukiman kumuh di dalam kota tahun 1960 – 1969? bagaimana pemerintah DKI Jakarta menanggulangi permukiman kumuh di Jakarta pada tahun 1960 – 1969? Bagaimana perkembangan peta permukiman kumuh di Jakarta tahun 1960-1969?

Bab V Kesimpulan. Bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi peneliti tentang inti pembahasan penulisan.